

# Reaktualisasi Pancasila sebagai Landasan Etika Komunikasi Publik di Era Digital

## ABSTRACT

*The re-actualization of Pancasila as the ethical foundation for public communication in the digital era has become increasingly essential, as technological development has significantly transformed patterns of communication and created complex ethical challenges for Indonesian society. Digital platforms enable the rapid dissemination of information without adequate verification, resulting in the spread of hoaxes, hate speech, polarization, and identity-based conflicts. In this context, Pancasila serves not only as a normative moral guide but also as a practical ethical framework that directs communication behavior to remain dignified and responsible. Using a normative–empirical approach, this study analyzes the relevance of Pancasila in establishing healthy, ethical, and constructive digital public communication. Findings from open-access academic literature indicate that Pancasila plays a crucial role in maintaining social harmony, strengthening information integrity, and fostering meaningful public dialogue. Furthermore, strengthening Pancasila values can be implemented through digital literacy education and character development among the youth, who represent the largest group of digital media users. Thus, Pancasila remains relevant and necessary as an ethical foundation for digital-era communication marked by rapid disruption.*

**Keyword:** Pancasila, Ethics, Public Communication, Digital Era

## ABSTRAK

*Reaktualisasi Pancasila sebagai landasan etika komunikasi publik di era digital semakin penting karena perkembangan teknologi telah mengubah pola komunikasi secara drastis dan menghadirkan tantangan etis yang kompleks bagi masyarakat Indonesia. Media digital memungkinkan penyebaran informasi secara instan tanpa proses verifikasi yang memadai sehingga memunculkan risiko penyebaran hoaks, ujaran kebencian, polarisasi, dan konflik identitas. Dalam konteks tersebut, nilai-nilai Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral yang bersifat normatif tetapi juga sebagai kerangka etika praktis yang dapat digunakan untuk menilai dan mengarahkan perilaku komunikasi publik agar tetap beradab. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif–empiris untuk menganalisis relevansi nilai Pancasila dalam membangun budaya komunikasi digital yang sehat dan bertanggung jawab. Kajian literatur menunjukkan bahwa Pancasila memiliki peran besar dalam menjaga harmoni sosial, memperkuat integritas informasi, dan mendorong dialog publik yang konstruktif. Selain itu, penguatan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui pendidikan literasi digital dan penguatan karakter bagi generasi muda sebagai pengguna terbesar media digital. Dengan demikian, Pancasila tetap relevan dan sangat dibutuhkan sebagai fondasi etika komunikasi di era digital yang sarat disrupsi.*

**Kata Kunci:** Pancasila, Etika, Komunikasi Publik, Era Digital

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang begitu cepat telah menciptakan perubahan besar dalam pola komunikasi masyarakat, terutama karena media sosial kini menjadi ruang utama untuk mengekspresikan pendapat, membangun identitas, dan mengakses informasi dalam waktu yang sangat singkat. Kondisi ini menyebabkan komunikasi publik mengalami pergeseran fungsi, dari yang sebelumnya bersifat tatap muka menjadi bersifat virtual, sehingga mengurangi kontrol sosial yang biasanya dapat membatasi tindakan negatif. Dampak dari perubahan tersebut adalah meningkatnya potensi penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, serta provokasi politik yang dapat memicu perpecahan sosial apabila tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Etika komunikasi publik di era digital harus kembali pada prinsip musyawarah dan penghormatan martabat manusia sebagai wujud penerapan nilai Pancasila secara substantif<sup>i</sup>. Namun, tantangan muncul ketika nilai-nilai tersebut tidak lagi dipahami secara mendalam oleh generasi muda yang merupakan pengguna terbesar media digital. Oleh karena itu, reaktualisasi nilai Pancasila menjadi sangat penting agar dapat memandu perilaku komunikasi publik dalam ruang digital yang semakin kompleks. Proses reaktualisasi ini perlu dilakukan secara sistematis melalui pendidikan, kebijakan publik, dan peran aktif masyarakat<sup>ii</sup>.

Perubahan pola komunikasi yang semakin terbuka dan bebas di era digital membawa dampak positif berupa kemudahan akses informasi, namun juga diikuti risiko besar berupa degradasi nilai-nilai etika yang sebelumnya dijunjung tinggi dalam budaya komunikasi Indonesia. Fenomena seperti perundungan siber, komentar bernada kebencian, penyesatan informasi, dan manipulasi opini publik menjadi semakin sering terjadi karena masyarakat cenderung terjebak dalam ruang gema digital yang memperkuat bias dan emosi negatif. Selain itu, tidak adanya mekanisme penyaringan informasi membuat masyarakat mudah menerima dan menyebarkan konten tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pihak lain. Situasi ini semakin memprihatinkan ketika tindakan komunikasi tersebut mengganggu stabilitas sosial dan menurunkan kualitas demokrasi. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa perlu direaktualisasikan agar mampu menuntun masyarakat dalam

menghadapi arus informasi yang tidak terkendali. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal membutuhkan penafsiran kontekstual agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi modern. Upaya ini menjadi krusial untuk menjaga kualitas komunikasi publik yang sehat dan beradab.<sup>iii</sup>

Generasi muda sebagai aktor utama dalam penggunaan media digital memiliki peran strategis dalam menciptakan ruang komunikasi yang sehat, namun kurangnya pemahaman tentang etika digital membuat mereka rentan terlibat dalam perilaku komunikasi yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Banyak di antara mereka menggunakan media sosial sebagai tempat untuk mengekspresikan emosi secara bebas tanpa mempertimbangkan norma sosial ataupun etika komunikasi yang seharusnya dijunjung tinggi. Fenomena perundungan siber, penyebaran rumor, serta konten provokatif sering kali berakar pada rendahnya literasi etika digital yang seharusnya mengarah pada perilaku komunikasi yang bijak dan bertanggung jawab. Dalam perspektif Pancasila, perilaku komunikasi tersebut bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, persatuan, dan keadilan yang menjadi dasar interaksi sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam pendidikan formal maupun nonformal agar generasi muda memahami bagaimana etika komunikasi harus dijalankan dalam ruang digital. Peningkatan pemahaman nilai Pancasila juga dapat mendorong generasi muda menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan ruang digital yang lebih positif. Dengan demikian, generasi muda dapat memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial melalui komunikasi yang etis.<sup>iv</sup>

Sebagai sebuah ideologi terbuka, Pancasila memiliki fleksibilitas untuk ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan makna dasarnya, sehingga sangat cocok dijadikan landasan etika komunikasi publik di era digital. Dalam ruang digital yang sarat akan dinamika dan kecepatan informasi, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman untuk mengarahkan perilaku komunikasi agar tetap sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Tantangan muncul ketika masyarakat tidak lagi menjadikan nilai Pancasila sebagai pedoman moral sehingga mudah terjebak dalam gaya komunikasi yang kasar, intoleran, dan provokatif. Padahal, nilai Pancasila menghendaki adanya

penghormatan terhadap martabat manusia, persatuan, dan musyawarah sebagai prinsip dasar dalam menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, reaktualisasi nilai-nilai Pancasila merupakan upaya penting dalam menciptakan ruang digital yang tidak hanya informatif tetapi juga beretika. Proses ini memerlukan strategi komprehensif melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dengan demikian, Pancasila dapat terus relevan sebagai etika digital nasional<sup>v</sup>.

Ruang digital telah membuka peluang bagi terciptanya demokratisasi informasi, namun pada sisi lain juga menjadi arena bagi berbagai praktik komunikasi yang tidak mencerminkan nilai-nilai kebangsaan. Penyebaran konten ujaran kebencian, propaganda ekstrem, dan manipulasi opini publik sering digunakan sebagai alat untuk memecah belah masyarakat. Padahal, Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan rasa kebangsaan yang kuat sebagai modal sosial dalam menjaga keutuhan negara. Jika nilai persatuan tidak diperkuat dalam ruang digital, maka dinamika konflik sosial akan semakin sering terjadi dan mengancam stabilitas nasional. Oleh karena itu, pendidikan nilai persatuan dalam Pancasila sangat penting untuk diterapkan dalam komunikasi digital agar masyarakat mampu mengelola perbedaan pendapat dengan cara yang santun dan konstruktif. Selain itu, penguatan regulasi dan pengawasan ruang digital juga diperlukan agar nilai persatuan dapat terwujud secara nyata dalam komunikasi daring. Dengan demikian, Pancasila memiliki peran penting dalam menciptakan ruang digital yang harmonis.<sup>vi</sup>

Ruang digital sebagai ruang publik baru semestinya memungkinkan masyarakat untuk saling bertukar informasi secara konstruktif, namun kenyataan menunjukkan bahwa ruang ini justru kerap menjadi tempat berkembangnya intoleransi, misinformasi, dan tindakan agresif verbal yang berpotensi merusak harmoni sosial. Situasi ini terjadi karena tidak adanya filter normatif yang secara otomatis membatasi perilaku komunikasi pengguna sehingga setiap orang dapat mengekspresikan pandangannya secara bebas tanpa mempertimbangkan etika dan dampak sosialnya. Di tengah kondisi seperti ini, nilai musyawarah dalam Pancasila menjadi sangat penting karena menekankan pentingnya dialog yang rasional, inklusif, dan mengutamakan penyelesaian

masalah secara damai. Nilai musyawarah dapat menjadi pedoman untuk menahan diri dari perilaku impulsif yang kerap muncul di ruang digital akibat pemicu emosional seperti provokasi atau disinformasi. Selain itu, nilai ini juga mengajarkan masyarakat pentingnya mencari kebenaran melalui klarifikasi, bukan sekadar bereaksi cepat terhadap setiap informasi yang diterima. Jika nilai musyawarah ini dapat diterapkan secara konsisten, maka ruang digital dapat berfungsi sebagai medium diskusi produktif yang memperkuat kualitas demokrasi. Dengan demikian, Pancasila memiliki peran strategis dalam mengarahkan dinamika komunikasi publik agar tetap berorientasi pada kepentingan bersama.<sup>vii</sup>

Selain menekankan pentingnya musyawarah, Pancasila juga mengandung nilai keadilan sosial yang sangat relevan dalam konteks literasi digital dan pemerataan akses informasi. Di era digital, ketimpangan literasi membuat sebagian masyarakat mudah terpengaruh oleh informasi menyesatkan karena tidak memiliki kemampuan untuk mengevaluasi kualitas informasi secara kritis. Ketimpangan ini menimbulkan ketidakadilan informasi yang pada akhirnya memperlebar disparitas sosial, terutama bagi kelompok rentan yang sulit mengakses pendidikan digital berkualitas. Dengan demikian, nilai keadilan sosial dapat menjadi dasar dalam merancang program literasi digital yang inklusif sehingga setiap lapisan masyarakat mampu berpartisipasi secara setara dalam komunikasi publik. Selain itu, nilai ini mendorong pemerintah dan institusi pendidikan untuk memperluas akses informasi yang benar dan berkualitas guna menciptakan ruang digital yang adil bagi semua kalangan. Reaktualisasi nilai keadilan ini sangat penting untuk mencegah dominasi kelompok tertentu yang memanfaatkan ketidaktahuan publik demi tujuan manipulatif. Oleh karena itu, Pancasila dapat dijadikan acuan moral dalam menciptakan literasi digital yang adil dan merata.<sup>viii</sup>

Pentingnya reaktualisasi Pancasila dalam komunikasi publik digital semakin terasa ketika melihat meningkatnya kasus ujaran kebencian yang berkaitan dengan isu agama, politik, dan identitas sosial yang berkembang pesat melalui platform media sosial. Konten-konten semacam ini sering menyebar sangat cepat karena algoritma media digital cenderung memprioritaskan konten

provokatif yang dapat memicu interaksi tinggi. Dalam kondisi ini, nilai kemanusiaan dan persatuan menjadi sangat penting untuk menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik berbasis identitas yang dapat mengancam stabilitas nasional. Pancasila mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati sehingga komunikasi publik harus dijalankan dengan tetap menjunjung nilai kesantunan dan toleransi. Nilai kemanusiaan dan persatuan ini juga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang berpotensi memecah belah. Dengan demikian, reaktualisasi Pancasila dapat menjadi dasar dalam meredam berbagai bentuk provokasi yang muncul di ruang digital. Oleh sebab itu, pendidikan etika digital berbasis Pancasila sangat diperlukan untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap konten negatif.<sup>ix</sup>

Tingginya fenomena penyimpangan komunikasi digital menunjukkan perlunya pendekatan pendidikan yang lebih komprehensif untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual kepada generasi muda. Pendidikan yang hanya mengajarkan Pancasila secara teoretis tanpa mengaitkannya dengan realitas digital tidak lagi cukup untuk membimbing perilaku komunikasi generasi saat ini. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan harus mengintegrasikan pemahaman tentang konsekuensi etis dari setiap tindakan komunikasi digital, termasuk bagaimana informasi yang disebarluaskan dapat memengaruhi kesejahteraan sosial. Pendidikan karakter digital berbasis Pancasila dapat mendorong siswa untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam interaksi digital sehari-hari. Selain itu, pendidikan ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, empati digital, dan tanggung jawab sosial yang merupakan fondasi penting dalam menciptakan ruang digital yang sehat. Strategi ini perlu diperkuat melalui kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan pemerintah agar pembentukan karakter digital dapat berjalan efektif. Dengan demikian, nilai Pancasila akan terus hidup dalam praktik komunikasi generasi muda.<sup>x</sup>

Berdasarkan berbagai dinamika komunikasi digital yang telah dibahas, jelas bahwa reaktualisasi nilai Pancasila merupakan langkah mendesak dalam menjaga keharmonisan sosial dan kualitas komunikasi publik di Indonesia.

Tanpa nilai Pancasila, ruang digital berpotensi menjadi arena konflik berkepanjangan yang didorong oleh perbedaan identitas, preferensi politik, hingga kepentingan kelompok tertentu. Nilai Pancasila memberikan pedoman yang dapat digunakan untuk mengatur perilaku komunikasi agar tetap menghargai martabat manusia, memprioritaskan persatuan, serta mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan. Implementasi nilai ini tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan platform digital. Selain itu, reaktualisasi nilai Pancasila perlu diwujudkan melalui kebijakan publik, penguatan literasi digital, dan kampanye etika digital yang berkelanjutan. Dengan demikian, Pancasila tetap relevan sebagai fondasi utama dalam menghadapi tantangan etika komunikasi publik di era digital. Reaktualisasi ini juga memastikan bahwa ruang digital tetap menjadi tempat yang aman, produktif, dan mencerminkan jati diri bangsa Indonesia.<sup>xi</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **normatif–empiris**, yang memadukan kajian terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etika komunikasi publik dengan analisis fenomena nyata dalam ruang digital yang menunjukkan berbagai bentuk penyimpangan etis. Pendekatan normatif dilakukan melalui telaah literatur yang mencakup jurnal ilmiah, peraturan, dan dokumen akademik yang menjelaskan peran Pancasila sebagai etika publik, sehingga diperoleh kerangka konseptual yang kokoh dalam menilai dinamika komunikasi digital. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan dengan menelaah temuan berbagai penelitian terkini yang mendokumentasikan fenomena seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, polarisasi opini, dan perundungan siber, sehingga gambaran kondisi komunikasi publik di era digital dapat dilihat secara komprehensif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan landasan etika Pancasila dengan kebutuhan regulasi komunikasi dalam konteks masyarakat digital yang cepat berubah. Selain itu, metode ini membantu

menjelaskan mengapa nilai Pancasila tetap relevan dan bagaimana nilai tersebut dapat diimplementasikan secara praktis dalam kehidupan digital masyarakat. Dengan demikian, pendekatan normatif–empiris memberikan gambaran menyeluruh mengenai urgensi reaktualisasi Pancasila dalam etika komunikasi publik.<sup>xii</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Nilai Ketuhanan: Fondasi Kejujuran dan Integritas Informasi**

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan bahwa setiap perilaku manusia, termasuk tindakan komunikasi, harus dilandasi kejujuran, ketulusan, serta kesadaran moral bahwa apa pun yang disampaikan memiliki konsekuensi etis yang dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada nilai ketuhanan itu sendiri. Dalam konteks komunikasi digital, nilai ini sangat penting karena penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan seringkali terjadi akibat minimnya kesadaran moral dan keinginan untuk mendapatkan perhatian secara instan. Reaktualisasi nilai Ketuhanan dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk memeriksa kembali integritas informasi sebelum menyeirkannya, terutama ketika informasi tersebut berpotensi menimbulkan keresahan publik. Selain itu, nilai ini mendorong pengguna digital untuk tidak terlibat dalam produksi konten yang bersifat fitnah, manipulatif, atau provokatif. Dengan demikian, nilai Ketuhanan berfungsi sebagai rem etis yang membatasi perilaku merugikan dalam komunikasi publik digital. Penerapan nilai ini dapat membentuk budaya digital yang lebih jujur dan bertanggung jawab.<sup>xiii</sup>

Penerapan nilai Ketuhanan juga mencakup penghormatan terhadap keberagaman agama dan keyakinan yang ada di Indonesia, terutama dalam komunikasi digital yang sering kali menjadi arena munculnya provokasi berdasarkan sentimen keagamaan. Ketika masyarakat memahami bahwa nilai Ketuhanan menuntut penghormatan terhadap setiap pemeluk agama, maka mereka akan lebih berhati-hati dalam mengomentari isu-isu sensitif yang dapat

memicu konflik. Ruang digital sering kali memperbesar perbedaan karena kecepatan informasi dan kurangnya konteks dalam komunikasi daring. Dalam kondisi ini, nilai Ketuhanan dapat menjadi dasar etis untuk mencegah intoleransi dan ujaran kebencian dengan mendorong komunikasi yang santun, empatik, dan bermartabat. Implementasi nilai ini sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah masyarakat plural. Oleh karena itu, nilai Ketuhanan berperan penting dalam meredam tensi konflik digital berbasis agama.

### **Nilai Kemanusiaan: Etika Interaksi Digital yang Beradab**

Nilai kemanusiaan dalam Pancasila menuntut masyarakat untuk memperlakukan sesama dengan adil, beradab, dan penuh penghormatan, sehingga nilai ini memiliki relevansi sangat besar dalam ruang digital yang sering kali menjadi arena terjadinya perundungan siber dan kekerasan verbal. Masyarakat digital cenderung berinteraksi tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial dari kata-kata yang mereka sampaikan, karena interaksi virtual menghilangkan batasan moral yang biasanya ada dalam komunikasi tatap muka. Dalam kondisi ini, nilai kemanusiaan dapat menjadi pedoman penting untuk menciptakan komunikasi yang penuh empati dan kesadaran moral sehingga mengurangi potensi tindakan agresif. Reaktualisasi nilai kemanusiaan juga dapat meningkatkan kualitas interaksi digital yang lebih sehat dan menghormati martabat setiap individu. Dengan demikian, nilai kemanusiaan berfungsi sebagai penuntun bagi pengguna digital untuk bertindak lebih bijak.

Implementasi nilai kemanusiaan juga mencakup kemampuan untuk memahami perspektif dan pengalaman orang lain dalam komunikasi digital, sehingga masyarakat tidak terburu-buru menilai atau menyerang pihak lain tanpa memahami konteks secara menyeluruh. Dalam interaksi digital, kesalahpahaman sangat mudah terjadi karena komunikasi berbasis teks sering kali tidak mampu menyampaikan emosi dan maksud secara lengkap. Dengan demikian, nilai kemanusiaan menuntut pengguna digital untuk berpikir lebih

hati-hati dan mempertimbangkan dampak sosial dari setiap pernyataan. Penerapan nilai ini dapat mengurangi praktik diskriminasi, ujaran kebencian, dan perilaku merendahkan di ruang digital. Selain itu, nilai kemanusiaan juga berperan dalam memperkuat solidaritas digital, terutama ketika masyarakat berhadapan dengan isu-isu kemanusiaan dalam skala nasional maupun global. Nilai ini memastikan bahwa ruang digital tetap menjadi ruang yang aman bagi semua.

### **Nilai Persatuan: Pencegah Polarisasi Digital**

Nilai persatuan memegang peranan vital dalam menghadapi fenomena polarisasi digital yang semakin meningkat akibat algoritma media sosial yang memperkuat segregasi opini dan menciptakan ruang gema (echo chamber). Dalam kondisi seperti ini, masyarakat lebih mudah terprovokasi oleh konten yang memperkuat pandangan kelompok mereka dan menolak informasi dari pihak lain, sehingga konflik digital menjadi sulit dihindari. Nilai persatuan yang diajarkan Pancasila dapat menjadi pedoman moral untuk menahan diri dari menyebarkan konten provokatif yang berpotensi memecah belah bangsa. Penerapan nilai ini dapat menciptakan ruang digital yang lebih inklusif, di mana perbedaan pandangan dapat diakomodasi dengan cara yang konstruktif. Dengan demikian, nilai persatuan berfungsi sebagai landasan etika untuk menjaga kohesi sosial di era digital,

Reaktualisasi nilai persatuan juga mencakup pentingnya meningkatkan literasi politik digital sehingga masyarakat mampu membedakan informasi yang bersifat provokatif dengan informasi yang benar-benar bermanfaat. Ketika nilai persatuan menjadi pedoman etika digital, masyarakat akan lebih cenderung menghindari konflik yang tidak perlu dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan pandangan. Dengan demikian, ruang digital dapat menjadi medium untuk memperkuat integrasi nasional dan bukan menjadi sumber perpecahan. Penerapan nilai persatuan juga mendorong masyarakat untuk menghormati keberagaman pandangan politik, budaya, dan agama.

Dengan cara ini, nilai persatuan dapat menjaga stabilitas sosial di tengah derasnya arus informasi digital.

### **Nilai Musyawarah: Mendorong Dialog Sehat dalam Ruang Digital**

Nilai musyawarah mengajarkan pentingnya penyelesaian masalah melalui dialog yang rasional, inklusif, dan mengedepankan kepentingan bersama, sehingga nilai ini sangat relevan untuk menciptakan ruang digital yang sehat. Di era digital, perdebatan tanpa arah sering kali terjadi karena pengguna cenderung bereaksi cepat tanpa menganalisis substansi informasi secara mendalam. Reaktualisasi nilai musyawarah membantu menciptakan pola interaksi yang lebih produktif dengan mendorong masyarakat untuk berdiskusi secara argumentatif dan tidak emosional. Nilai ini dapat mengurangi perpecahan dan mendorong terciptanya ruang digital yang deliberatif. Dengan demikian, nilai musyawarah berperan penting dalam meningkatkan kualitas komunikasi publik.

Selain itu, nilai musyawarah dapat menuntun masyarakat untuk melakukan verifikasi informasi (*tabayyun*) sebelum menyebarkan suatu berita, terutama ketika informasi tersebut memiliki potensi memecah belah masyarakat. Masyarakat yang mengedepankan nilai musyawarah cenderung menghindari tindakan impulsif seperti membagikan informasi yang belum diverifikasi. Hal ini sangat penting untuk menjaga kualitas diskursus publik dan mengurangi penyebaran informasi menyesatkan. Dengan demikian, nilai musyawarah dapat menjadi fondasi penting dalam membangun perilaku komunikasi yang bertanggung jawab.<sup>xiv</sup>

### **Nilai Keadilan: Prinsip Tanggung Jawab dalam Komunikasi Publik**

Nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila menegaskan bahwa setiap tindakan komunikasi memiliki konsekuensi sosial dan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Dalam konteks digital, nilai ini mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan ruang digital sebagai alat

untuk merugikan atau mendiskriminasi kelompok tertentu. Penyebaran hoaks dan propaganda manipulatif adalah bentuk ketidakadilan informasi yang dapat diperbaiki melalui penerapan nilai keadilan sosial. Dengan menerapkan nilai ini, masyarakat dapat menciptakan ruang digital yang lebih setara dan inklusif.

Implementasi nilai keadilan juga mencakup penyediaan akses literasi digital yang merata di seluruh lapisan masyarakat agar setiap individu memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami, mengolah, dan menilai kualitas informasi. Ketimpangan literasi digital dapat menyebabkan ketidakadilan informasi yang merugikan kelompok tertentu. Dengan demikian, nilai keadilan sosial dapat menjamin bahwa ruang digital menjadi ruang yang aman dan layak bagi semua orang

## KESIMPULAN

Reaktualisasi Pancasila sebagai landasan etika komunikasi publik di era digital merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas interaksi sosial serta mencegah berbagai penyimpangan etika yang semakin marak di ruang digital. Dalam era disruptif informasi ini, Pancasila menyediakan kerangka nilai yang relevan untuk mengatur komunikasi berbasis kejujuran, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Implementasi nilai-nilai tersebut dapat memperkuat budaya digital yang sehat dengan menekankan pentingnya tanggung jawab sosial, verifikasi informasi, penghormatan terhadap perbedaan, serta disiplin dalam menyampaikan pendapat. Reaktualisasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab individu tetapi juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan platform digital. Dengan demikian, penerapan nilai Pancasila dalam komunikasi digital dapat menciptakan ruang publik yang lebih aman, bermartabat, dan mencerminkan identitas kebangsaan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2024). Etika komunikasi digital dalam perspektif nilai Ketuhanan. *Jurnal Wawasan Tridharma*, 9(1).
- Hasan, Z. (2025). Pancasila dan kewarganegaraan. CV Alinea Edumedia.
- Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap identitas budaya lokal dan Pancasila. *JIMA*, 2(1), 73–82.
- Hasan, Z., Sumbahan, M. R. A. R., Izazi, A., & Darmawan, M. A. (2025). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital sehari-hari. *JMIA: Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 425–433
- Hidayat, R., & Zulfikar, A. (2024). Kemanusiaan dalam komunikasi publik digital. *Jurnal Manajemen*, 12(1).
- Marzuki, A., & Shaleh, A. (2024). Penguatan etika komunikasi melalui nilai Pancasila. *Tsaqofiya Journal*, 10(2).
- Mulyadi, S. (2023). Musyawarah dan verifikasi informasi dalam era digital. *UJPH Journal*, 14(1).
- Nasution, A., & Fadhilah, R. (2023). Reaktualisasi etika komunikasi berbasis Pancasila. *Ihsan Journal*, 11(2).
- Nugroho, S., & Sari, N. (2024). Nilai keadilan dalam komunikasi publik digital. *Sawwa Journal*, 19(1).
- Rahmawati, D., & Akbar, F. (2024). Musyawarah dalam komunikasi publik. *Potret Journal*, 8(1).
- Rosyid, T., & Wahyuni, D. (2024). Pendidikan karakter digital berbasis Pancasila. *PPKn Journal*, 6(1).
- Rozi, M., & Wahyudi, A. (2023). Toleransi digital dalam perspektif Pancasila. *Al-Badar Journal*, 9(2).
- Setyorini, L. (2023). Pendekatan normatif-empiris dalam kajian etika komunikasi. *Civics Journal*, 15(2).

Tanjung, R., & Lubis, U. (2023). Etika kemanusiaan dalam komunikasi digital masyarakat. FD Journal, 10(2).

Wulandari, S., & Prasetyo, B. (2023). Penguatan nilai persatuan dalam ruang digital. Civics Journal, 16(1).

## END NOTE

---

- <sup>i</sup> Hasan, Z., Sumbahan, M. R. A. R., Izazi, A., & Darmawan, M. A. (2025). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital sehari-hari. *JMIA: Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 425–433
- <sup>ii</sup> Hasan, Z. (2025). *Pancasila dan kewarganegaraan*. CV Alinea Edumedia.
- <sup>iii</sup> Tanjung, R., & Lubis, U. (2023). *Etika kemanusiaan dalam komunikasi digital masyarakat*. FD Journal, 10(2).
- <sup>iv</sup> Hidayat, R., & Zulfikar, A. (2024). *Kemanusiaan dalam komunikasi publik digital*. Jurnal Manajemen, 12(1).
- <sup>v</sup> Nasution, A., & Fadhilah, R. (2023). *Reaktualisasi etika komunikasi berbasis Pancasila*. Ihsan Journal, 11(2).
- <sup>vi</sup> Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap identitas budaya lokal dan Pancasila. *JIMA*, 2(1), 73–82.
- <sup>vii</sup> Rahmawati, D., & Akbar, F. (2024). *Musyawarah dalam komunikasi publik*. Potret Journal, 8(1).
- <sup>viii</sup> Nugroho, S., & Sari, N. (2024). *Nilai keadilan dalam komunikasi publik digital*. Sawwa Journal, 19(1).
- <sup>ix</sup> Rozi, M., & Wahyudi, A. (2023). *Toleransi digital dalam perspektif Pancasila*. Al-Badar Journal, 9(2).
- <sup>x</sup> Rosyid, T., & Wahyuni, D. (2024). *Pendidikan karakter digital berbasis Pancasila*. PPKn Journal, 6(1).
- <sup>xi</sup> Marzuki, A., & Shaleh, A. (2024). *Penguatan etika komunikasi melalui nilai Pancasila*. Tsaqofiya Journal, 10(2).
- <sup>xii</sup> Setyorini, L. (2023). *Pendekatan normatif-empiris dalam kajian etika komunikasi*. Civics Journal, 15(2).
- <sup>xiii</sup> Arifin, M. (2024). *Etika komunikasi digital dalam perspektif nilai Ketuhanan*. Jurnal Wawasan Tridharma, 9(1).
- <sup>xiv</sup> Mulyadi, S. (2023). *Musyawarah dan verifikasi informasi dalam era digital*. UJPH Journal, 14(1).